

**REFLEKSI GANDENG GENDONG
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA**

Luluk Muryani¹, Sugiyanto²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta^{1, 2}

email : lulukmuryani@gmail.com¹, probosugiyanto@gmail.com²

ABSTRAK

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat adalah isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya daya saing pelaku usaha kecil serta belum adanya sinergi yang kuat keterpaduan antar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Hal ini mendorong dicetuskannya inovasi program Gandeng Gendong, yaitu program kerjasama antar stakeholder pembangunan. Untuk mewujudkan inovasi Gandeng Gendong, perlu penguatan peran stakeholder, yaitu kota, korporasi, kampus, komunitas dan kampung yang diakronim dengan istilah 5K. Stakeholder Peran dan kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan pembangunan tersebut akan membawa dampak positif atas keberhasilan program gandeng gendong. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dipilih sesuai teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dan dan sekunder diintegrasikan dalam konten analisis kemudian diuji dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program gandeng memberikan dampak positif dalam penurunan angka kemiskinan. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, jumlah angka kemiskinan mengalami tren penurunan, yaitu 0,86%. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergabung dalam program gandeng gendong, khususnya dalam aplikasi nglarisi semakin bertambah. Namun masih ditemukan beberapa kendala yaitu pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dirasakan belum cukup.

Kata kunci : *Gandeng gendong, pemberdayaan masyarakat.*

ABSTRACT

Poverty and income inequality in the community are strategic issues for the Yogyakarta City Government. One of the reasons is the low competitiveness of small businesses and the lack of strong synergy between poverty alleviation programs and activities. This encouraged the initiation of the Gandeng Gendong program innovation, namely a collaboration program between development stakeholders. To realize Gandeng Gendong's innovation, it is necessary to strengthen the role of stakeholders, namely cities, corporations, campuses, communities and villages, which is acronymed with the term 5K. Strong stakeholders will have a positive impact on the success of the tandem carrying program. Qualitative descriptive research approach. Informants were selected according to purposive sampling technique. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. Primary and secondary data are integrated into content analysis and then tested using triangulation techniques. The research results show that the collaboration program has had a positive impact in reducing poverty rates. From 2019 to 2023, the poverty rate experienced a downward trend, namely 0.86%. Apart from that, the level of participation of people who are members of the gangen gendong program, especially in the nlarisi application, is increasing. However, several obstacles were still found, namely that assistance from authorized Regional Apparatus Organizations was felt to be insufficient.

Keyword : *Gandeng gendong, community empowerment*

PENDAHULUAN**Gambaran Umum Tentang Kemiskinan di Kota Yogyakarta**

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang terjadi di semua daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan masalah pendapatan, namun juga terkait dengan faktor lain yang sifatnya multidimensional. Pemerintah mengalami kesulitan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan selama ini hanya dilihat dalam satu dimensi saja, yaitu masalah ekonomi (Baniadi & Mustofa, 2018).

Kota Yogyakarta dengan segala permasalahannya membuat persoalan kemiskinan menjadi lebih kompleks. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 tahun 2017 disebutkan bahwa kecenderungan kemiskinan di Kota Yogyakarta terjadi karena kurangnya kesempatan, keterbatasan kepemilikan aset/barang, serta akses terhadap pelayanan sosial. Pada 2022 menunjukkan persentase penduduk miskin sebesar 6,62%, atau setara dengan sejumlah 29.680 jiwa penduduk miskin dan menurun pada tahun 2023 menjadi 6,49% (BPS, 2024). Hal ini tentu saja menjadi semangat baru bagi Kota Yogyakarta untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Maka, untuk keperluan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinsosnakertrans, telah melakukan verifikasi dan validasi Data. Data yang dimaksud adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 1. Kemiskinan Kota Yogyakarta, 2020 -2023

Variabel Kemiskinan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	31.62	34.07	29.68	29.48
Prosentase Penduduk Miskin	7.27	7.64	6.62	6.49
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.19	1.07	0.8	0.86
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.28	0.21	0.13	0.18
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	533.423	556.674	601.905	662.267

Sumber: Data Sekunder Kota Yogyakarta diolah 2024

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengentasan Kemiskinan

Kerja sama lintas sektor sangat penting dalam pengentasan kemiskinan karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga dengan masalah akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan.

Dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan inovasi dalam pengentasan kemiskinan, yaitu Program Gandeng Gendong. Landasan kebijakan atas inovasi Program Gandeng Gendong adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama di antara stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya. Yang



dimaksud dengan stakeholder pembangunan adalah pemangku kepentingan pembangunan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan Program Gandeng Gendong yang meliputi Pemerintah Daerah (Kota), Swasta (korporasi), Perguruan Tinggi (kampus), Komunitas dan Kampung (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan singkatan 5K.

1. Kota (Pemerintah Daerah) adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Korporasi (swasta) adalah perusahaan atau lembaga swasta yang merupakan unit usaha untuk memperoleh profit dan mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, baik dengan menggunakan dana CSR, atau dana lainnya maupun kegiatan lainnya yang bertujuan membantu masyarakat Kota Yogyakarta.
3. Kampus (perguruan tinggi) adalah lembaga Pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta atau yang mempunyai legalitas dan sah diakui oleh pemerintah Indonesia, yang menjalankan program Tridharma untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Komunitas adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, dan atau kumpulan hobi dan minat, dan atau kumpulan pemerhati masalah sosial, ekonomi dan seni-budaya, dan atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat.
5. Kampung adalah Kawasan wilayah atau masyarakat warga Kota Yogyakarta yang menjadi sasaran kegiatan gandeng gendong agar bisa lebih berdaya, meningkat kesejahteraannya dan maju.

Program Gandeng Gendong sebagai Solusi Inovatif

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, sehingga akan efektif jika melibatkan unsur 5K dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program Gandeng Gendong memiliki keunggulan yang berbeda dengan inovasi-inovasi lainnya, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendekatan Kolaboratif
Keunggulan Program Gandeng Gendong adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan atau stakeholder pembangunan yaitu kota, korporasi, kampus, komunitas dan kampung.
2. Pendekatan pemberdayaan masyarakat
Program Gandeng Gendong mengandalkan konsep pemberdayaan masyarakat, tidak semata-mata memberikan bantuan materi kepada masyarakat. Namun Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan pelatihan ketrampilan, akses Pendidikan, akses permodalan, menciptakan peluang untuk berusaha kepada masyarakat miskin sehingga mampu mandiri dan meningkatkan taraf kehidupannya secara berkelanjutan.
3. Peningkatan Solidaritas dan Komunitas
Gandeng Gendong memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga maupun komunitas warga. Hal ini mampu menciptakan ikatan sosial yang kuat, di mana masyarakat saling peduli dan bahu-membahu dalam menghadapi tantangan bersama, yaitu kemiskinan.
4. Memperkuat kearifan lokal
Kota Yogyakarta terkenal dengan kearifan lokal maupun kebudayaannya. Masyarakat Yogyakarta sudah terbiasa dengan prinsip gotong royongnya. Program Gandeng Gendong merupakan salah satu dari kearifan local tersebut dengan nilai-nilai kebersamaan, saling peduli dan saling dmembantu.

Dalam melihat pemberdayaan Masyarakat (Rosidin, 2019), maka digunakan konsep yang dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dapat ditempuh melalui tiga tahapan berikut:



- a. Penciptaan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Hal ini dikarenakan manusia tanpa daya akan punah. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dengan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses dalam berbagai peluang yang membuat masyarakat jadi berdaya.
- c. Perlindungan dalam proses pemberdayaan (protecting). Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu dapat mengerdilkan yang kecil dan mematahkan yang lemah. Melindungi dilihat dari upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi bergantung pada berbagai program pemberian. Tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menyebabkan adanya transformasi otonomi daerah. Aturan ini direspon oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Sinergitas antar pemangku kepentingan dianggap sebagai kunci dalam pengentasan kemiskinan yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya akan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberhasilan pembangunan dan secara khusus pada pengentasan kemiskinan sehingga wajib menerapkan berbagai aturan dan kebijakan dalam konsep tata kelola kolaboratif atau *collaboratif governance* serta kolaborasi multistakeholder. *Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008).

Pemerintah Kota Yogyakarta membuat program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu Program Gandeng Gendong. Program gandeng gendong adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Program Gandeng Gendong melibatkan lima pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan 5K dalam pelaksanaannya, yaitu pemerintah kota, korporasi, kampus, komunitas dan kampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.

Program Gandeng Gendong telah menjadi inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan berbasis gotong royong. Inovasi Gandeng Gendong semakin mengukuhkan Kota Yogyakarta sebagai Smart City pada dimensi Smart Society yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai implementasi Gandeng

Gendong di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program gendeng-gendong. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data primer dan sekunder diintegrasikan dalam konten analisis (Sugiyanto, 2021a) sehingga menghasilkan penjelasan deskriptif gendeng gendong dalam memberdayakan masyarakat di Kota Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur 5K, yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, Korporasi, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Kampung. Informan ditentukan dengan purposive sampling. Wawancara mendalam mendapatkan pemahaman penerapan program gendeng gendong. Data dokumen terdiri dari kebijakan, pedoman, dan laporan terkait implementasi program gendeng gendong. Data yang diperoleh, penulis analisa, dimulai dari reduksi data, yaitu mengelompokkan, menyederhanakan dan membuang data yang tidak diperlukan. Penyajian data, yaitu menyajikan data hasil penelitian baik berupa narasi, tabel, gambar sehingga bisa diketahui pola hubungan dan lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari hubungan, persamaan, perbedaan untuk menjawab permasalahan dari hasil penelitian (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Gandeng Gendong adalah program untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kota Yogyakarta dengan menekankan adanya pemanfaatan potensi lokal dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta melibatkan lima stakeholders dalam pelaksanaannya (5K), yaitu Pemerintah Kota, komunitas, korporasi, kampung, dan kampus. Sejauh ini implementasi tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Sejak dilaksanakan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terdapat tren penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta meskipun persentasenya masih kecil.

Program Gandeng Gendong memiliki kegiatan Nglarisi yang melalui Jogja Smart Service (JSS) yang terdapat kelompok-kelompok penyedia makanan dan minuman. Program Gandeng Gendong merupakan sebuah inovasi pengentasan kemiskinan yang menggunakan konsep kemitraan multi pihak.

Program Gandeng Gendong dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan paling utama adalah mindset atau pola pikir masyarakat. Spirit Program Gandeng Gendong dalam pengentasan kemiskinan di berbagai sektor sementara hanya dipahami masyarakat sebagai program penyediaan makanan ringan/snack dan makanan saja.

Aplikasi Nglarisi adalah aplikasi belanja jamuan makan minum rapat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dimanfaatkan oleh penyedia Gandeng Gendong, yaitu komunitas UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Kota Yogyakarta. Potensi alokasi anggaran jamuan makan minum APBD dimanfaatkan sebagai daya dorong pemasaran produk oleh kelompok UMKM kuliner. Diharapkan aplikasi ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberdayakan masyarakat yang masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Layanan aplikasi Nglarisi menghubungkan OPD dengan kelompok gendeng gendong, untuk memastikan pemesanan kebutuhan makan dan minum dilakukan secara efisien dan merata. Aplikasi Nglarisi tergabung dalam layanan Jogja Smart Service (JSS) yang dapat diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dalam *smartphone* atau melalui web browser jss.jogjakota.go.id.

Dari tahun pertama pelaksanaan Program Gandeng Gendong hingga tahun 2021, jumlah masyarakat yang tergabung dalam Program Gandeng Gendong semakin meningkat setiap

tahunnya. Dari jumlah kelompok hingga jumlah anggota yang tergabung dalam program ini. Berikut rekap jumlah anggota Nglarisi Program Gandeng Gendong hingga tahun 2022.

Tabel 2. Jumlah Pendaftar Aplikasi Nglarisi Program Gandeng Gendong

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelompok	81	171	235	255	297
Jumlah Anggota	1.164	1.744	2.178	2.133	2.461

Sumber : Profil Aplikasi Nglarisi, diolah 2024

Implementasi kemudahan komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan media Jogja Smart Service pada sub menu Nglarisi, di mana seluruh aktor 5K dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas UMKM masyarakat kampung. Mengingat saat ini telah memasuki era digitalisasi yang hampir seluruh warga Yogyakarta telah memiliki alat komunikasi smartphone, maka komunikasi melalui media massa juga menjadi penting. Penggunaan media digital dapat Jogja Smart Service (JSS) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Jogja Smart Service sebagai Sarana Pelaksanaan Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta

Sumber: Data Diolah, 2024

Dampak positif penggunaan aplikasi Nglarisi yaitu efisiensi anggaran. Penggunaan aplikasi Nglarisi membantu OPD melakukan pemesanan kebutuhan makan dan minum lebih efisien waktu maupun tenaga. Selain itu, dampak positif aplikasi nglarisi adalah peningkatan pendapatan kelompok gendeng gendong mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dengan pemesanan dari OPD.

Program perlu dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi yang tepat. Pemilihan model evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan benar dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem atau program yang dievaluasi. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah salah satu model evaluasi yang paling sering digunakan dalam evaluasi program. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield pada tahun 1985 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu. Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu konteks, input, proses, dan produk.

1. Context Evaluation

Tujuan program gendeng gendong adalah meningkatkan peran dan kerjasama stakeholder pembangunan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan melalui Program Gandeng Gendong; meningkatkan kerjasama dan mengoptimalkan potensi setiap stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat dan adanya langkah gerak bersama para

stakeholder pembangunan dalam satu peta jalan (roadmap) untuk pengembangan kampung atau kawasan atau masyarakat Kota Yogyakarta.

Kebijakan yang mendasari program gandeng gendong adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden tersebut juga menjadi acuan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya suatu program bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penguatan peran semua stakeholder pembangunan, yang melibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta, korporasi, kampus, komunitas dan kampung.

Program gandeng gendong lahir berangkat dari kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta, salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya daya saing pelaku usaha kecil dan menengah serta belum ada kejelasan sinergi keterpaduan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang mestinya dilaksanakan. Program gandeng gendong teruji ketika Indonesia dilanda pandemi covid-19. Kebangkitan ekonomi di masa pandemi Covid-19, gandeng gendong tidak hanya diterjemahkan dalam konteks kuliner, tetapi gandeng gendong mencakup dan bisa diimplementasikan dalam segala hal. Gandeng Gendong menginspirasi warga saat menghadapi Covid-19 dengan Gerakan Nglarisi, Ngluwihi, dan Mbagehi yaitu gerakan membeli di warung tetangga dengan jumlah lebih banyak untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

2. Input Evaluation

Untuk melaksanakan program gandeng gendong ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan sumber daya besarnya anggaran jamuan makan dan minum sebagai daya ungkit. Pelaku program gandeng gendong dikenal dengan istilah 5K, yaitu kota, korporasi, kampus, komunitas dan kampung. Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta dimana salah satu tugas dan fungsinya sebagai pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

3. Process Evaluation

Program gandeng gendong dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan atau 5K, dimana masing-masing stakeholder mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya. Strategi yang dilaksanakan :

- a. Memberdayakan masyarakat khususnya kelompok-kelompok kuliner yang ada di kampung dan tersebar se Kota Yogyakarta.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi strategis di wilayah, yang berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya.
- c. Menjadikan gandeng gendong sebagai perencanaan strategis untuk pembangunan yang mengintegrasikan pada seluruh pelaku 5K. Keberlanjutan program gandeng gendong didukung dengan penguatan 5K melalui pembentukan Forum TSLP, Forum LPPM dan Forum Gandeng Gendong.

Interkasi 5K tertuang dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentuk Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Dijelaskan bahwa Forum Gandeng Gendong adalah koordinator Forum Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Forum Kampung, Forum Komunitas dan Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta mengoordinasikan semua program dari forumforum menjadi satu langkah bersama dan disinergikan dengan program-program pemerintah.

4. Product Evaluation

Program gendeng gendong turut memberikan kontribusi yang positif pada upaya penanggulangan kemiskinan. Sejak dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terjadi tren penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Hal ini didukung dengan program gendeng gendong yang selaras dengan *masterplan* Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga bisa menjadi jalan tengah antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemberdayaan masyarakat yang berprinsip saling gotong royong. Kekuatan maupun kekuasaan Pemerintah Kota Yogyakarta mengamanatkan kepada seluruh OPD untuk menggandeng dan menggendong kelompok gendeng gendong merupakan modal politik yang sangat kuat. Di sisi lain terdapat kepatuhan dari kelompok gendeng gendong di setiap lini kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pembahasan

Tren kemiskinan lebih cenderung terkait dengan sektor ekonomi karena sektor ekonomi lebih mudah diamati, diukur dan diperbandingkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Program penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil. Program gendeng gendong merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan, yang telah dilaksanakan lebih dari lima tahun. Dalam pelaksanaannya, Program Gandeng Gendong melibatkan lima stakeholder atau 5K, yang dalam pelaksanaan Gandeng Gendong mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta (Kota), dalam pelaksanaan gendeng gendong memiliki kewajiban untuk :
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan Program Gandeng Gendong;
 - 2) Membentuk forum gendeng-gendong tingkat kota yang melibatkan stake holder untuk menyepakati program dan roadmap kegiatan setiap tahun;
 - 3) Mengkoordinasi program, kegiatan dan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai sinergitas dengan Program Gandeng Gendong;
 - 4) Menyusun dan mengarahkan kelompok sasaran Program Gandeng Gendong;
 - 5) Membuat kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 - 6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses pembinaan dalam pelaksanaan Program Gandeng Gendong sampai ke tingkat wilayah;
 - 7) Membangun sinergitas dengan pelaku usaha;
 - 8) Melakukan pembinaan dan penataan usaha mikro dan kecil; dan
 - 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Gandeng Gendong.Tugas dan kewajiban pemerintah kota di atas sesuai dengan sebuah agen maupun kewenangan yang mengatur maupun mengendalikan segala persoalan bersama atas nama masyarakat di dalamnya
- b. Korporasi bertugas melakukan kerjasama dengan usaha mikro dan kecil yang ada di wilayahnya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk antara lain :
 - 1) Mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi Masyarakat.

- 2) Menggunakan dan mengutamakan tenaga lokal dalam usaha/kegiatan sesuai kriterianya.
- 3) Menggunakan produk usaha mikro dan kecil local.
- 4) Mempromosikan dan memasarkan produk usaha mikro dan kecil.
- 5) Memberikan dukungan terhadap pembinaan, bantuan, pelatihan peningkatan mutu produk sesuai standar konsumen.
- 6) Menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan atau dana sosial dan atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial di dalam perannya ikut memajukan lingkungan wilayahnya.

Model korporasi ternyata mampu memberikan peningkatan secara signifikan pertumbuhan ekonomi UMKM, kondisi ini senada dengan hasil studi (Sunariani et al., 2017), walaupun ada perbedaan pada peran pemerintah.

c. Kampus :

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dan kampung, untuk pengembangan bidang usaha mikro dan kecil.
- 2) Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan manajemen terhadap usaha mikro dan kecil.
- 3) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam produksi, pemasaran, manajemen usaha kecil dan mikro di masyarakat dan kampung.
- 4) Melaksanakan studi potensi lokal untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kampung.
- 5) Melaksanakan studi untuk pengembangan pangsa pasar lokal, regional dan internasional.
- 6) Memfasilitasi kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- 7) Menyalurkan dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, dalam rangka pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta. Indikator diatas telah terbukti bahwa tugas perguruan tinggi dalam penelitian dan mengabdikan berkewajiban meningkatkan kuaalitas SDM, hal ini sesuai dengan hasil studi (Aman et al., 2023) bahwa Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghadapi era Society 5.0 dengan mengembangkan program-program untuk meningkatkan jiwa inovatif dan semangat Creativepreneurship mahasiswa,dan Masyarakat luas.

d. Komunitas :

- 1) Memberikan wadah/asosiasi/forum usaha mikro dan kecil dalam pengembangannya.
- 2) Melakukan konsolidasi inter dan antar komunitas.
- 3) Melakukan usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil.
- 4) Melakukan promosi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 5) Ikut berperan aktif dalam sosialisasi Program Gandeng Gendong melalui pencantuman Logo Gandeng Gendong pada setiap kemasan produk yang diikutsertakan dalam Program Gandeng Gendong. Komunitas Gandeng Gendong senada dengan studi (Rahmanto et al., 2018) bahwa pengurus komunitas dan anggota komunitas perlu melakukan sharing pengetahuan, dan meningkatkan kinerjanya melalui komunitasnya agar jaringan bisnisnya semakin luas.

e. Kampung :

- 1) Melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi usaha mikro dan kecil.
- 2) Melakukan usulan dan penataan usaha mikro dan kecil.
- 3) Melakukan pendampingan usaha mikro dan kecil.
- 4) Melaksanakan promosi sesuai dengan potensi wilayahnya.

5) Melaksanakan koordinasi inter dan antar kampung dalam satu wilayah.

Peran dan ketugasan yang diemban oleh kampung merupakan bentuk implementasi pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah kampung, untuk dapat mengembangkan diri berdasarkan penggalan potensi yang ada di kampung.

Menurut (Sugiyanto, 2021b) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya untuk mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran, meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian Masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya dan bukan masyarakat yang menjadi tergantung pada program pembangunan yang ada namun harus dihasilkan dan dinikmati atas hasil usaha sendiri.

Program Gandeng Gendong merupakan bentuk inovasi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, terbukti dengan adanya penghargaan inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan merefleksikan bagaimana implemetasi Program Gandeng Gendong sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik di waktu yang akan datang. Gandeng gendong merupakan program inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan visi program yaitu bersama dan bersatu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Program juga didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Kurniawati et al., 2014). Merefleksi berarti menilai, menilai menggunakan indikator tertentu teori yang digunakan dalam merefleksikan atau menilai implementasi program gandeng gendong dalam penelitian ini adalah Model CIPP merupakan singkatan (akronim) dari *context evaluation*, *input evaluastion*, *process evaluation*, dan *product evaluation* yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada tahun 1968 di Ohio State University.

Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta

Pemerintahan Kota Yogyakarta terus berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, berbagai carapun telah dilakukan, salah satunya adalah dengan berinovasi dengan program gandeng gendong.

1. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses enabling

Sebagai salah satu indikator pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kemudahan dan mempunyai keberpihakan kepada kelompok yang diberdayakan, dalam hal ini adalah para pelaku gandeng gendong dalam menjalankan usahanya. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui organisasi perangkat daerah yang berwenang melaksanakan sosialisasi, motivasi, pendampingan agar tetap bertahan dan meningkatkan usahanya. Pembentukan Program Gandeng Gendong oleh Pemerintah Kota Yogyakarta juga disertai pembentukan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Tujuan forum tersebut adalah agar semangat Gandeng Gendong dari aktor agar tidak menurun dan semangat Gandeng Gendong dapat diimplementasikan ke semua lini dengan berpijak ke konsep Segoro Amarto. Yang memberikan sebuah kekuatan-kekuatan untuk masyarakat dan pelaku gandeng gendong.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah terkait telah secara rutin melaksanakan sosialisasi program gandeng gendong di setiap kelurahan yang menghadirkan pihak-pihak terkait seperti forum UMKM, Ketua TP. PKK Kemantren/ Kelurahan, Ketua LPMK, Ketua kampung dan koordinator kelompok gandeng gendong. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM selaku OPD yang berwenang juga telah melaksanakan pendampingan kepada kelompok gandeng gendong, termasuk produk yang belum lolos kurasi (Junianto, 2024). Dengan demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk mengoptimalkan potensi kelompok usaha melalui pendampingan intensif serta

meningkatkan kapasitas. Setelah produk UMKM lolos kurasi, maka akan dipajang di aplikasi e-nglarisi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 disebutkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta melalui perangkat daerah yang berwenang telah merencanakan program dan kegiatan hingga tahun 2026 yang berfokus pada pelaku UMKM di antaranya adalah Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kedua program ini diharapkan mampu menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada UMKM dan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi UMKM untuk menjalankan aktifitas ekonominya.

2. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam empowering

Maksud pemberian empowering adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dan kemampuan kelompok sasaran dalam hal ini kelompok gandeng gendong. Pembentukan Program Gandeng Gendong oleh Pemerintah Kota Yogyakarta juga disertai pembentukan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Tujuan pembentukan forum tersebut adalah agar semangat Gandeng Gendong dari aktor agar tidak menurun dan semangat Gandeng Gendong dapat diimplementasikan ke semua lini dengan berpijak ke konsep Segoro Amarto yang memberikan sebuah kekuatan-kekuatan untuk masyarakat dan pelaku gandeng gendong.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan ruang yang sangat cukup kepada kelompok gandeng gendong untuk memasarkan produk kelompoknya. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan kesempatan kepada kelompok gandeng gendong untuk memasarkan produknya di kompleks Balaikota Yogyakarta pada waktu yang telah ditentukan serta mendorong kemantren dan kelurahan untuk melaksanakan even yang dapat memfasilitasi pemasaran produk kelompok gandeng gendong, seperti kegiatan Gelar Potensi Gandeng Gendong.

Peran pemerintah kota Yogyakarta dalam inovasi gandeng gendong sesuai teori “ACTORS” lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya.

3. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam protecting

Aktivitas protecting Pemerintah Kota Yogyakarta adalah membuat sistem perlindungan yang dapat melindungi masyarakat pelaku gandeng gendong sebagai subjek pengembangan. Dalam proses pengembangan harus melakukan pencegahan terhadap masyarakat yang lemah agar tidak menjadi semakin lemah karena tidak berdaya dalam menghadapi persaingan usaha dari kelompok yang kuat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perlindungan dari produk agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Perlindungan juga dalam memperoleh modal, jangan sampai terjebak dalam pemodal dengan bunga pinjaman tinggi yang selalu mengincar para pelaku usaha kecil, selalu memberikan pengawasan dan bantuan modal usaha. Perlindungan lain adalah berkaitan dengan tempat usaha dan pemasaran produk, sehingga tidak mudah digusur pihak lain atau dilarang memasarkan di tempat tertentu.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengupayakan peningkatan daya saing UMKM, salah satunya adalah dengan memfasilitasi sertifikasi dan legalitas. Produk UMKM juga didorong untuk bersertifikat halal, baik produk makanan dan non makanan secara regular maupun sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong UMKM untuk mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai bentuk legalitas usaha UMKM, bekerja sama dengan perangkat daerah lain yang berwenang, seperti Baznas dan Dinas Kesehatan setempat (Razak, 2024).

Pelaksanaan Program Gandeng Gendong Kolaboratif 5K

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena berkaitan dengan harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun pembangunan di berbagai sektor telah dilaksanakan namun belum mampu menekan meningkatnya angka kemiskinan.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Program Gandeng yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong merupakan tindakan konkret dari smart city dan smart society. Dalam program ini ada inovasi yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Konsep ini membawa Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder Pembangunan, yang lebih dikenal dengan istilah 5K. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong menjelaskan bahwa pemerintah kota, korporasi, kampus, komunitas, dan kampung (5K) dapat berperan aktif sesuai perannya masing masing dalam mendorong keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

1. Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta beserta semua organisasi perangkat daerahnya.
2. Kampus atau perguruan tinggi adalah lembaga Pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta atau yang mempunyai legalitas dan sah diakui oleh pemerintah Indonesia, yang menjalankan program Tridharma untuk pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
3. Korporasi atau swasta adalah perusahaan atau lembaga swasta yang merupakan unit usaha untuk memperoleh profit dan mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, baik dengan menggunakan dana CSR, atau dana lainnya maupun kegiatan lainnya yang bertujuan membantu masyarakat Kota Yogyakarta dan memiliki kepedulian terhadap isu pembangunan, terutama kemiskinan serta berkontribusi melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).
4. Komunitas adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, dan atau kumpulan hobi dan minat, dan atau kumpulan pemerhati masalah sosial, ekonomi dan seni-budaya, dan atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu Masyarakat.
5. Kampung adalah Kawasan wilayah atau masyarakat warga Kota Yogyakarta yang menjadi sasaran kegiatan gandeng gendong agar bisa lebih berdaya, meningkat kesejahteraannya dan maju.

Masing-masing aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong telah memiliki peran dan tugas tersendiri.

1. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki peran sebagai perumus kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksana serta monitoring dan evaluasi program.
2. Korporasi berperan sebagai pengguna dan pengembang produk lokal, promosi, serta fasilitator dalam bentuk forum TSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan).
3. Aktor komunitas berperan melaksanakan konsolidasi inter dan antar komunitas dalam pelaksanaan program serta melakukan sosialisasi.
4. Kampus atau perguruan tinggi berperan dalam memberikan dukungan terhadap penguatan SDM termasuk pelaku UMKM, sekaligus sebagai Research and Development melalui forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
5. Aktor kampung atau masyarakat berperan sebagai aktor basis pelaksanaan dan pengembang program.

Pelaksanaan Program Gandeng Gendong telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong. Regulasi tersebut telah memuat ketentuan peran masing-masing aktor 5K (kota, kampus, korporasi, komunitas dan kampung). Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari Program Gandeng Gendong pada dasarnya terdiri dari tiga hal, yakni:

1. Meningkatkan peran dan kerja sama stakeholders dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan lingkungan.
2. Meningkatkan kerja sama dan mengoptimalkan potensi stakeholders dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat.
3. Mendorong terwujudnya gerak bersama stakeholders pembangunan dalam satu peta jalan (road map) untuk pengembangan kampung atau kawasan atau masyarakat di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng korporasi seperti: BPD/BRI/bank-bank lain, hotel-hotel, komunitas sepeda seperti Jogja Bike, komunitas makanan tradisional Jogja, komunitas batik Jogja, Kampus dengan melibatkan mahasiswanya dalam KKN, praktikum, penelitian-penelitian lapangan, serta kampung dengan melibatkan kelompok-kelompok UMKM. Untuk menjaga keberlangsungan Program Gandeng Gendong dan untuk menjaga semangat gandeng gendong di aktor 5K tidak menurun, Pemerintah Kota membentuk Forum Gandeng Gendong dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Selain itu, pembentukan Forum Gandeng Gendong juga untuk menyepakati program dan roadmap setiap tahunnya. Pertemuan Forum Gandeng Gendong rutin dilakukan sebulan sekali tetapi juga bisa dua bulan sekali, tergantung dari persoalan yang timbul di Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut biasa dilakukan untuk menyamakan persepsi dari 5K dan membahas persoalan-persoalan baru yang dihadapi serta informasi-informasi lain yang terkait.

Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki untuk tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan, yaitu usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks.

Program Gandeng Gendong pada intinya adalah suatu program dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yang dipergunakan dalam program gandeng gendong adalah strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan memberdayakan kelompok-kelompok kuliner yang ada di kampung se Kota Yogyakarta. Tahap kedua yaitu pemberdayaan Kawasan, di mana gandeng gendong sejak awal tidak hanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat namun juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melihat potensi strategis yang bisa diandalkan. Tahap ketiga, menjadikan program gandeng gendong sebagai perencanaan strategis untuk pembangunan yang mengintegrasikan pada seluruh pelaku 5K.

Sejalan dengan inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Fasilitas untuk Penyuluh Kewirausahaan. Kegiatan ini mencoba curi start Program Gandeng Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta yang di launching Selasa 10 April 2018 oleh Wali Kota Yogyakarta. Penyuluh



kewirausahaan sesungguhnya kebutuhan bangsa Indonesia yang digagas oleh BK3S DIY yang diujicobakan untuk Kota Yogyakarta, mengingat ruh pelatihan ini model aplikasi 5K dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, yaitu :

1. K1 : Kota, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diampu oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. K2 : Korporate atau dunia usaha , dalam pelatihan ini 80% biaya pelatihan di sponsori oleh Owner Dowa.
3. K3 : Komunitas, penggerak kegiatan ini BK3S DIY dengan sasaran peserta komunitas wirausaha muda Kota Yogyakarta yang dikenal dengan nama *Home Business Camp* (HBC).
4. K4 : Kampus, narasumber utama dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Dr. Sugiyanto. S.Sos. MM dan Dr. Yuli Setyowati. M.Si. dari Prodi Ilmu Komunikasi serta Praktisi KKB Samsul SE. MM dan Pakar Fasilitasi Drs. Ruba'i. M.Pd.
5. K5 : Kampung. Hasil pelatihan Penyuluh Kewirausahaan akan dinikmati masyarakat seluruh kampung di Kota Yogyakarta, sebab peserta nantinya akan mendampingi UMKM kususnya pelaku usaha *start up*.

KESIMPULAN

Program Gandeng Gendong adalah program untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kota Yogyakarta dengan menekankan adanya pemanfaatan potensi lokal dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta melibatkan lima stakeholders dalam pelaksanaannya (5K), yaitu Pemerintah Kota, komunitas, korporasi, kampung, dan kampus. Sejauh ini implementasi tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Sejak dilaksanakan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terdapat tren penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta meskipun persentasenya masih kecil. Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta bisa menjadi salah satu strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan, karena mengangkat nilai kearifan lokal yaitu nilai gotong royong yang sangat kuat di Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, Gandeng Gendong bisa berarti saling mendukung antara stakeholder, yaitu kota, korporasi, kampus, komunitas dan kampung yang diakronim dengan istilah 5K.

Program Gandeng Gendong dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan paling utama adalah mindset atau pola pikir masyarakat. Spirit Program Gandeng Gendong dalam pengentasan kemiskinan di berbagai sektor hanya dipahami masyarakat sebagai program penyediaan makanan ringan/snack dan makanan saja. Mengubah mindset masyarakat bukan hal yang mudah, harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. Banyak pelaku usaha mikro yang terjebak dalam zona nyaman, atau cepat merasa puas dengan perolehan sesaat, merasa mampu bertahan dengan apa adanya. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan untuk membangun motivasi dan mem-*brainstroming* warga yang tergabung dalam Gandeng Gendong, dengan narasumber atau motivator yang berkompeten. Dengan demikian, kelompok Gandeng Gendong akan mendapatkan support energi maupun support spiritual untuk menjalankan usahanya yang tergabung di aplikasi Nglarisi. Dengan *brainstroming*, diharapkan akan memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam satu kelompok Gandeng Gendong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aman, A., *et al* (2023). Peran dan strategi Perguruan Tinggi dalam membentuk SDM unggul yang berjiwa *creativepreneurship* di era society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional*

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Baniadi, P., & Mustofa, M. (2018). Kemiskinan multidimensi di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 45-56. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/19706> (Tambahkan DOI jika ada, dan perbaiki volume serta halaman)
- BPS. (2024). Kota Yogyakarta dalam angka 2023. <https://jogjakota.bps.go.id/publication/2023/02/28/9510c8b16be475ce64f99471/kota-yogyakarta-dalam-angka-2023.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Junianto, A. (2024, July 3). Pemkot terus tingkatkan kapasitas produk UMKM Gandeng Gendong yang tak lolos kurasi. *Harian Jogja*.
- Kurniawati, R. T., et al (2014). *Evaluasi program*. Universitas Terbuka.
- Rahmanto, B. T., et al (2018). Peran komunitas dalam meningkatkan kinerja UKM ditinjau dari faktor internal. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 21-30.
- Razak, A. H. (2024, April 20). Tingkatkan daya saing, Pemkot Jogja dorong sertifikasi dan legalitas produk UMKM. *Harian Jogja*.
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintahan daerah*. Pustaka Setia.
- Sugiyanto. (2018, April). Gandeng-Gendong penyuluh kewirausahaan. *Bernas*. <https://www.bernas.id/2018/04/44947/63135-gandeng-gendong-penyuluh-kewirausahaan/>
- Sugiyanto. (2021a). Dampak triangulasi hasil terhadap keberlanjutan organisasi dalam penelitian kualitatif studi kasus di LKS Hamba DIY. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 8, 7219–7232.
- Sugiyanto. (2021b). *Manajemen fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat*. The Journal Publishing.
- Sunariani, N. N., Suryadinatha, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Pemberdayaan UMKM melalui program binaan Propinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181-196.